



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DENDI RAMADHONA KALIGIS
2. Jabatan : BUPATI
3. NHH : 207697

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 9.630.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 505 m2/336 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HIBAH TANPA AKTA Rp. 2.915.000.000
2. Tanah Seluas 426 m2 di KAB / KOTA TANJUNG KARANG, HASIL SENDIRI Rp. 2.215.000.000
3. Tanah Seluas 354 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 885.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 600 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , WARISAN Rp. 2.215.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 370 m2/320 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 1.400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 936.000.000**

1. MOTOR, HARLEY DAVIDSON TOURING Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
2. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
3. MOBIL, MERCEDES BENZ GL 400 AT (X166) CKD Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 370.000.000
4. MOBIL, TOYOTA TOYOTA ALPHARD Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 853.200.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 572.041.708**

**F. HARTA LAINNYA**

Rp. 70.261.000

Sub Total

Rp. 12.061.502.708

III. HUTANG

Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 12.061.502.708

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.